

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Difusi Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mendukung Transformasi Digital Pengelolaan Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa proses difusi aplikasi SAKIP telah berjalan dengan baik dan memenuhi lima karakteristik difusi inovasi menurut Everett M. Rogers, yaitu *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*.

Pada aspek *relative advantage*, aplikasi SAKIP memberikan manfaat nyata berupa pengelolaan kinerja yang lebih efektif, sistematis, transparan, dan terintegrasi mulai dari proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Pada aspek *compatibility*, aplikasi SAKIP telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, meskipun masih ditemukan ketidaksesuaian indikator antara aplikasi SAKIP, E-Monev, dan E-Kinerja yang menyebabkan sinkronisasi data belum sepenuhnya optimal.

Selanjutnya, pada aspek *complexity*, aplikasi SAKIP relatif mudah digunakan setelah aparaturnya memperoleh pendampingan dan pengalaman penggunaan, sehingga kendala yang muncul lebih banyak disebabkan oleh faktor kompetensi sumber daya manusia, kualitas data pendukung, serta

kendala teknis jaringan dan server. Pada aspek *trialability*, penerapan aplikasi SAKIP telah didahului dengan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pendampingan sehingga aparaturnya memiliki kesempatan untuk memahami mekanisme penggunaan aplikasi sebelum diterapkan secara penuh. Sementara itu, pada aspek *observability*, hasil penerapan aplikasi SAKIP dapat diamati melalui meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja, tersedianya data yang lebih terstruktur, meningkatnya akuntabilitas organisasi, serta terintegrasinya aplikasi SAKIP dengan berbagai aplikasi pendukung dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa difusi aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pada Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penyempurnaan, khususnya dalam meningkatkan sinkronisasi indikator antar aplikasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi integrasi sistem agar pengelolaan kinerja dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.

Satpol PP Kabupaten Bojonegoro diharapkan terus meningkatkan kualitas implementasi aplikasi SAKIP melalui penguatan koordinasi antarbidang, peningkatan kompetensi aparaturnya dalam pengelolaan kinerja berbasis digital, serta penyempurnaan kualitas data dukung

yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aplikasi SAKIP agar seluruh proses pengelolaan kinerja dapat berjalan secara optimal.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat meningkatkan integrasi antara aplikasi SAKIP, E-Monev, E-Kinerja, dan aplikasi pendukung lainnya sehingga tidak terjadi perbedaan indikator maupun duplikasi penginputan data. Harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi sistem informasi pengelolaan kinerja perlu terus dikembangkan untuk mendukung transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi aplikasi SAKIP dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda atau mengombinasikan teori difusi inovasi dengan teori implementasi kebijakan maupun transformasi digital. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan aplikasi SAKIP dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2016. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta:
- BPFE Cousins, B. L., & Earl, L. M. (1995). *Participatory Evaluation in Education: Studies in Evaluation*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth). SAGE Publications Inc.
- Dwiyanto, Agus. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis: A Political Economy Approach*. Pearson Education.
- Dunn, W. N. (2018). *sixth edition: Public Policy Analysis an Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Pearson Education.
- Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. 2004. *Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations*. The Milbank Quarterly
- Gronroos, C. (2000). *Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truth in Service Competition*. Lexington Books.
- Heeks, Richard. 2006. *Implementing and Managing e-Government: An International Text*. London: Sage Publications.
- Indrajit, Richardus Eko. 2016. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian PANRB. 2020. *Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Kettl, Donald F. 2015. *The Transformation of Governance: Public Administration for the Twenty-First Century*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
- LAN. 2020. *Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Malena, C. (2004). *Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice*. World Bank.
- McLaughlin, J. A., & Jordan, G. B. (1999). Logic Models: A Tool for Telling Your Program's Performance Story. *American Journal of Evaluation*, 20(2), 201-212.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mergel, Ines., Edelman, Noella., & Haug, Nathalie. 2019. *Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews*. Government Information Quarterly.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook (3rd ed)*. SAGE Publications Inc.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation*. Sage Publications.
- Raadschelders, J. C. N. (2011). *Public Administration: The Interdisciplinary Study of Government*. Oxford University Press.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation Thesaurus*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta.
- Syamsuddin, M. (2019). Transformasi digital dalam birokrasi: Peluang dan tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 45–62
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *World Population Prospects 2022*. New York, NY: United Nations.
- World Bank. (2023). *The Global Identification Challenge*. Washington, DC: World Bank Group.